

REFORMASI IMPLEMENTASI KONSEP *BLUE ECONOMY* SEBAGAI UPAYA PROTEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR KOTA SEMARANG

**Aulia Audrey Al Fahri^{1(a)}, Dinda Norrahmawati^{2(b)}, Kevin Daru Bailovan^{3(c)},
Rifky Usman Alfarez^{4(d)}, Sekar Alifia Rahmawati^{5(e)}, Kismartini^{6(f)},
Hartuti Purnaweni^{7(g)}**

^{1,2,3,4,5,6,7}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

^{a)}audreyalfahri@gmail.com, ^{b)}dindanorrahmawati@gmail.com, ^{c)}kdbailovan@gmail.com,

^{d)}rifkyusman76@gmail.com, ^{e)}sekaralif23@gmail.com, ^{f)}kis_martini@yahoo.co.id,

^{g)}hartutipurnaweni@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Article History:

Dikirim:

06-12-2022

Diterbitkan Online:

14-12-2022

Kata Kunci:

Blue Economy, Wilayah
Maritim, Stakeholders

Keywords:

Blue Economy, Maritime
Area, Stakeholders

Corresponding Author:

audreyalfahri@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i3.525>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi konsep blue economy dan peran stakeholders didalamnya pada wilayah maritim Kota Semarang. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan berupa dokumen penelitian, publikasi jurnal, dan data website pemerintah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa strategi dari penerapan blue economy di Kota Semarang yaitu dengan cara pemanfaatan teknologi dalam memaksimalkan akuakultur hingga perdagangan yang ada di wilayah pesisir Kota Semarang. Selanjutnya juga peran antar stakeholders perlu dijaga sinergitasnya untuk mencapai hasil yang maksimal nantinya.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the implementation of the blue economy concept and the role of stakeholders in it in the maritime area of Semarang City. In this study using a descriptive qualitative approach. Data collection techniques through library research in the form of research documents, journal publications, and government website data. The results of the study concluded that the strategy for implementing the blue economy in the city of Semarang is by utilizing technology to maximize aquaculture and trade in the coastal areas of Semarang city. Furthermore, the role of inter-stakeholders needs to be maintained in synergy to achieve maximum results later.

PENDAHULUAN

Pembangunan wilayah pesisir terus mengalami perubahan demi melestarikan lingkungan dan menghindari kerusakan agar dapat digunakan selayaknya dengan tetap memprioritaskan prinsip kelestarian lingkungan. Proses pengelolaan wilayah pesisir Indonesia membutuhkan interaksi dari berbagai pihak untuk dapat melakukan sistem pengelolaan mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pemantauan hingga pengendalian. Tujuannya adalah demi pemanfaatan wilayah pesisir yang berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat pesisir, serta keutuhan wilayah Negara Indonesia. Integrasi tersebut dapat diwujudkan melalui peraduan kegiatan pemerintah daerah, pemerintah kabupaten atau kota, pihak swasta, masyarakat, maupun akademisi. Wilayah pesisir Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Mengutip berdasarkan Rujukan Nasional Data Kewilayahan Republik Indonesia milik Badan Informasi Geospasial dan Pusat Hidrologi dan Oseanografi TNI AL pada tahun 2018, menunjukkan bahwa luas perairan Indonesia adalah 6,4 juta km². Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 luas daratan Indonesia adalah 1.916.906,77 km². Jika dibandingkan antara wilayah lautan dengan daratan, maka secara statistik 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Negara Indonesia mempunyai kekayaan laut dan pesisir yang begitu melimpah.

Adanya potensi yang besar juga diiringi tantangan yang besar pula dalam setiap perkembangannya, terlebih dengan semakin berkembangnya persaingan dunia. Bukan hanya pemerintah yang berperan penting untuk menjaga pelestarian wilayah pesisir, tetapi juga masyarakat luas yang khususnya secara langsung memanfaatkan dan tinggal di wilayah tersebut. Sebab masyarakat wilayah pesisir secara tidak langsung akan bergantung kepada sumber daya yang ada di sekitarnya yakni laut dan pesisir. Tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan wilayah pesisir adalah aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup sebagai bagian dari konsep *blue economy* oleh Gunter Pauli pada tahun 2010. Sinergi dari ketiga aspek tersebut menjadi dimensi penting terhadap konsep SDGs yang bertujuan untuk

menstabilkan *people, planet, peace and partnership*.

Berdasarkan karya ilmiah yang ditulis Suwiyadi, Sumardi, Maria Ayu Nugraheni pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki hasil perikanan laut yang besar. Namun banyak ditemui kendala eksternal utamanya dari para nelayan, karena situasi dan kondisi laut yang tidak pasti akan berpengaruh terhadap hasil tangkapan yang didapat. Kondisi tersebut mengakibatkan nelayan menjadi miskin sehingga kesejahteraannya ikut terganggu.

Konsep *blue economy* dinilai cocok untuk diimplementasikan pada wilayah Indonesia yang merupakan wilayah maritim. Salah satunya adalah Kota Semarang yang memiliki batas wilayah dengan Laut Jawa dan memiliki garis pantai sepanjang 20 kilometer. Kondisi tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk berprofesi sebagai nelayan dan mengelola hasil sumber daya kawasan pesisir Semarang. Berikut merupakan data masyarakat dalam memanfaatkan sektor perikanan yang tersebar di Kota Semarang.

Gambar 1. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kota Semarang Tahun 2019 dan 2020

Kecamatan	Perikanan Tangkap		Perikanan Umum		Jumlah	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Gunungpati			29	29	29	29
Genuk	43	45			43	45
Semarang Utara	734	753			734	753
Semarang Barat	12	12			12	12
Tugu	219	258			219	258
Ngaliyan	3				3	
Semarang	1011	1068	29	29	1040	1097

Sumber: Data BPS Kota Semarang (2020)

Dibalik banyaknya masyarakat yang berkecimpung pada sektor perikanan, sayangnya masih terdapat beragam permasalahan yang mengganggu wilayah pesisir Kota Semarang seperti masalah menurunnya permukaan tanah (*land*

subsidence) di daerah pesisir Semarang hingga mencapai 10 sentimeter. Permasalahan tersebut disampaikan oleh Ahli Tata Ruang dan Planologi yang berasal dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang yakni Mila Karmila. Permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa pesisir Kota Semarang memiliki kemungkinan untuk tenggelam lebih cepat. Penyebab lain munculnya permasalahan penurunan permukaan tanah tersebut diakibatkan adanya eksploitasi pembangunan yang dilakukan dengan pengambilan air dari tanah. Diketahui pula bahwa air tanah yang dimiliki Kota Semarang masih berupa tanah muda yang akan mengalami pemampatan secara terus-menerus sehingga eksploitasi air tanah secara berlebihan akan menyebabkan keadaan semakin memburuk.

Selanjutnya, terdapat permasalahan berupa banjir rob yang disebabkan meluapnya air laut atau air sungai. Permasalahan ini sering ditemukan di daerah Kampung Nelayan Tambak Rejo, Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang. Pemerintah Semarang berusaha menanggulangi permasalahan tersebut dengan melakukan kebijakan Normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur. Namun pelaksanaan program tersebut mengalami penolakan dan terjadi konflik antara pemerintah dengan masyarakat sekitar. Akhirnya setelah konflik secara berkepanjangan, pemerintah menata kembali wilayah tersebut dengan menyediakan infrastruktur hunian baru di Tambak Rejo agar masyarakat tidak kehilangan mata pencahariannya sebagai nelayan. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti memiliki ketertarikan untuk mempelajari permasalahan yang ada dengan judul Implementasi *blue economy* sebagai Upaya Proteksi Kesejahteraan Masyarakat di pesisir Kota Semarang.

METODE PENELITIAN

Sebagai proses penelitian yang sistematis, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengembangan konsep *blue economy* dikaji lebih dalam terkait strategi yang sesuai dengan wilayah penelitian. Data berupa fenomena yang telah diperoleh kemudian diolah oleh peneliti dan disampaikan secara sederhana atau deskriptif untuk memudahkan pemahaman pembaca. Penelitian ini menekankan pada teknik studi pustaka yang diperoleh melalui sumber sekunder yaitu artikel, website, serta kajian internet. Pemilihan teknik studi pustaka ini dilakukan melalui

mempelajari dan menganalisis literatur hingga merangkum data dan permasalahan yang ditemui untuk selanjutnya dirumuskan penyelesaian masalah dari penelitian ini. Peneliti memilih Kota Semarang sebagai lokasi penelitian yang memiliki wilayah pesisir yang cukup luas dan cocok sebagai wilayah pengembangan konsep *blue economy*. Diharapkan identifikasi potensi wilayah pesisir Semarang dapat berdampak positif dengan adanya strategi yang dirancang oleh penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pengembangan *Blue Economy* pada Wilayah Pesisir Kota Semarang

Era globalisasi merebak begitu kencang tak terbendung dalam dunia modern di era sekarang. Dengan modernisasi yang begitu pesat dengan diiringi oleh teknologi mutakhir, perubahan-perubahan didalam tata kehidupan menjadi berubah drastis. Perubahan-perubahan yang terjadi dapat menjadi peluang dalam membangkitkan potensi kedaerahan termasuk potensi pesisir daerah. Pada era teknologi dewasa ini, hakikatnya dengan berkembangnya teknologi dapat menghubungkan kehidupan asli dan dunia digitalisasi menuju kehidupan modern dan biologi yang mengubah pola dalam interaksi manusia secara fundamental (Tjandrawinata, 2016).

Perkembangan teknologi yang begitu pesat ini dapat menjadi peluang besar dalam mengembangkan segala aspek kehidupan begitu juga kehidupan ekonomi bagi masyarakat pesisir. Secara sosiologis, karakter dari masyarakat sekitar pesisir memiliki perbedaan dengan masyarakat yang memiliki domisili di area agraris, hal ini dikarenakan terdapat perbedaan sumber daya yang dihadapi. Masyarakat pertanian memiliki wilayah wilayah khusus atau dapat diartikan area dengan akses tertutup dengan tanah dan lahan atas milik pribadi, berbeda dengan kondisi masyarakat nelayan yang mengelola sumber daya kelautan dengan akses terbuka dan tidak terkontrol (Satria, 2015).

Masyarakat nelayan di Kota Semarang masih bergantung pada kegiatan nelayan dengan metode tradisional sehingga perlu pemanfaatan teknologi yang mutakhir. Salah satu konsep yang dapat diterapkan dalam pengelolaan dan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir adalah *blue economy*. Melalui pengembangan ini *blue economy* pada

wilayah pesisir Kota Semarang dapat menjadi solusi dari setiap permasalahan yang ada.

Indonesia di masa sekarang, sangat ramai muncul sebuah perubahan besar dalam teknologi informasi dapat membuka dan melebarkan peluang supaya dimanfaatkan dengan optimal untuk optimalisasi dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir. Dengan sebuah kebaruan dari *blue economy* yang memakai pemikiran baru dalam sektor akuakultur berupa upaya dalam peningkatan produktivitas dengan kegiatan budidaya dengan cara manualisasi. Selain itu industri akuakultur adalah sebuah langkah dalam mengimplementasikan sebuah Usaha Kecil Mikro atau UKM yang dapat diimplementasikan oleh masyarakat pesisir Kota Semarang yang pada dasarnya memiliki kontribusi yang besar pada aspek peningkatan perekonomian daerah dan nasional.

Dengan adanya inovasi teknologi seperti ini akan lebih baik jika terus disokong dan diimplementasikan dalam tata kehidupan masyarakat secara menyeluruh agar sektor akuakultur yang tidak terurus dengan baik dapat dimanfaatkan sebagai mesin penggerak ekonomi Kota Semarang oleh masyarakat pesisir.

Penerapan Prinsip *Blue Economy* pada Wilayah Pesisir Kota Semarang

Prinsip *Blue Economy* adalah implementasi dalam menyeimbangkan perspektif ekonomi dan lingkungan. *Blue economy* adalah konsep dalam mengoptimalkan sumber daya perairan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang ada yang dikelola secara inovatif dan kreatif serta tetap menjaga serta menjamin sebuah proses dalam keberlanjutan sebuah usaha dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Konsep blue ekonomi mengedepankan dan menekankan aspek pada efisiensi. Efisiensi dapat mendorong dengan adanya pengembangan dalam sebuah investasi dan bisnis hasil perikanan dan kelautan dengan tetap melestarikan dan menjaga lingkungan tetap lestari. Pada intinya, kegiatan *blue economy* adalah penerapan perekonomian kelautan dengan diimbangi pelestarian lingkungan pesisir.

Penerapan prinsip *blue economy* di Wilayah Pesisir Kota Semarang juga harus melakukan perimbangan antara kegiatan ekonomi kreatif, tetapi juga harus memperhatikan kelestarian

lingkungan. Pergerakan roda ekonomi pesisir harus bergerak maju dengan teknologi dan sistem mutakhir seperti pemanfaatan aplikasi dalam pemasaran hasil laut bagi para nelayan, proteksi berupa navigasi untuk keselamatan nelayan dalam melakukan kegiatan ekonomi, serta pengembangan UMKM yang harus digaungkan secara besar besaran untuk menambah penghasilan bagi para nelayan dan keluarganya di Wilayah Pesisir Kota Semarang. Selain itu, potensi pariwisata yang ada juga harus dikuatkan dari segi fasilitas, keamanan dan kenyamanan supaya dapat menggaet wisatawan lokal maupun nasional.

Pembaharuan sistem dan pemanfaatan teknologi dalam kegiatan usaha ekonomi masyarakat pesisir Kota Semarang, tidak serta merta melupakan aspek keberlangsungan lingkungan dan ekosistem sesuai dengan prinsip dalam *blue economy*. Para pelaku kegiatan ekonomi, perlu melakukan penjagaan dan pelestarian dalam kegiatannya. Seperti halnya menggunakan alat alat yang tidak merusak lingkungan dalam menangkap ikan, menghindari penggunaan racun dan pukat harimau didalam menangkap hasil laut. Selain itu, penting juga untuk menjaga garis pantai supaya terhindar dari abrasi dengan melakukan penanaman pohon bakau supaya dapat memecah ombak pantai dan menjadi tempat ekosistem bagi biota laut. Dengan menyeimbangkan proses kegiatan ekonomi dengan memperhatikan pelestarian lingkungan, maka akan tercipta kegiatan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Pengembangan Konsep *Blue Economy* Melalui Konsep Digitalisasi pada Wilayah Pesisir Kota Semarang

Perkembangan zaman yang semakin dinamis menuntut kita untuk selalu sigap dalam mengikutinya. Salah satu sektor yang mengalami perkembangan sangat cepat adalah perkembangan teknologi yang mana aktivitas manusia semula berbentuk manualisasi kini mulai dapat dikomputerisasikan. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia karena adanya proses digitalisasi ini tentu nantinya akan mengubah pola pikir, transformasi perbuatan, dan ruang lingkup kehidupan.

Beragam produk berkembang pesat guna memanjakan konsumen di pasar nantinya tak terkecuali pada sektor maritim. Proses digitalisasi yang integratif dan komprehensif pada sektor maritim tentu menjadi peluang yang

meyakinkan perkembangan wilayah pesisir di Indonesia mengingat Indonesia sendiri merupakan negara kedua di dunia yang memiliki garis pantai terpanjang. Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi informasi ini akan memberikan peluang dalam optimalisasi perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir.

Blue Economy merupakan gagasan baru pada sektor maritim yang dimana berusaha untuk meningkatkan produktivitas wilayah pesisir mulai dari perikanan, pariwisata, dan lain sebagainya. Upaya meningkatkan produktivitas kerja ini sendiri tentu pada dasarnya juga harus didukung dengan partisipasi dari masyarakat secara langsung yang menjadi aktor utama dalam perubahan yang ada. Tantangan yang sering menghantui masyarakat pesisir dalam memaksimalkan sumber daya sekitarnya adalah mengatasi kondisi kebutuhan pangan di tengah permasalahan *global climate change* (perubahan iklim global) dan penurunan tingkat daya dukung lingkungan. Hal ini tentu dapat menghambat dari pemerataan wilayah dan optimalisasi sumber daya nantinya.

Peran dunia bisnis dan bantuan teknologi yang ada tentu dapat menjadi salah satu upaya dalam menghadapi tantangan yang ada tersebut. Dengan mengoptimalkan proses pengembangan *integrated aquaculture business* (pengembangan bisnis akuakultur) dapat menjadi modal utama produksi yang mampu memberikan ragam bisnis turunan lainnya dan memperluas pangsa pasar sehingga hal tersebut akan berdampak pada stabilitas perekonomian daerah pesisir dan proteksi kesejahteraan bagi mereka juga nantinya.

Maka dari itu, penulis memiliki salah satu ide berupa rancang bangun aplikasi seperti model *fish market* berbasis *caused related marketing* yang mana sebagian keuntungan dari penjualan produk tersebut nantinya akan disalurkan kepada nelayan/masyarakat pesisir secara langsung yang dapat berguna bagi mereka seperti bantuan penunjang kehidupan, pinjaman modal usaha, hingga program pelatihan/pendidikan. Indonesia sebagai poros maritim dunia harus pandai dalam memanfaatkan peluang yang ada dalam mengeksplorasi kekayaan laut yang ada dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat.

Peran Stakeholders yang Terlibat dalam Implementasi Konsep *Blue Economy* pada Wilayah Pesisir Kota Semarang

Gambar 2. Aktor yang Terlibat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Kota Semarang

Pemerintah	Akademisi	Privat dan LSM
1. Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Undip	1. PT Djarum
2. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah	2. Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Undip	2. Bintari
3. Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang		
4. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang		
5. Dinas Pariwisata Kota Semarang		
6. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang		

Sumber: Diolah Penulis (2022)

a) Pemerintah

Peran pemerintah disini lebih diarahkan pada pengendali keberjalanan program, pengelolaan sumberdaya, dan perizinan terhadap pelaksanaan kegiatan serta pembangunan tertentu. Pengendalian disini memiliki tujuan untuk mengurangi tingkat inefisiensi selama implementasi program. Pengelolaan sumberdaya sendiri harus dilakukan secara sistematis dan merata sehingga dapat menebar kebermanfaatn kepada masyarakat pesisir secara lebih optimal nantinya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang memiliki andil sebagai garda terdepan dalam pengelolaan wilayah pesisir ini. Berbagai intervensi diterapkan dalam proses pengelolaan program. Pada tingkat daerah pihak yang lebih *concern* dalam keberjalanan program ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang. Selain itu, perihal administrasi juga akan dilakukan oleh pihak ini.

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dapat menjadi aktor yang aktif dalam memberikan pemberdayaan masyarakat pesisir itu sendiri melalui basis kewirausahaan dan koperasi simpan pinjam. Dengan adanya dua aktor ini sendiri, diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam menunjang iklim kewirausahaan masyarakat pesisir Kota

Semarang yang tentu akan berdampak pada kemandirian ekonomi pada wilayah tersebut.

Dinas Pariwisata Kota Semarang memiliki keterlibatan dalam aspek pariwisata maritim di Kota Semarang. Tidak dapat kita pungkiri bahwa Kota Semarang memang memiliki banyak potensi wisata wilayah pesisir seperti Pantai Tirang, Pantai Marina, Taman Maerokoco, dan lain sebagainya. Apabila sektor pariwisata tersebut dapat dikelola dengan baik, tentu akan menunjang perekonomian daerah juga.

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang memiliki orientasi pada *environment upgrading* yang mana mereka bertanggung jawab terhadap kualitas lingkungan wilayah pesisir tersebut. Dengan banyaknya pembangunan yang dilakukan, tentu kita harus melihat dari segi keberlanjutannya juga salah satunya melalui aspek lingkungan. Apakah pembangunan yang dilakukan tersebut berpotensi merusak kualitas lingkungan yang nantinya akan menimbulkan masalah lingkungan lainnya tentu hal ini harus diseleksi secara ketat.

b) Akademisi

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Undip merupakan salah satu akademisi yang dapat membantu dalam sistem pengelolaan wilayah pesisir melalui kajian teoritis yang dilakukan seperti penelitian, tesis, ataupun skripsi sehingga hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta rekomendasi dalam mengimplementasi program yang akan dilakukan nantinya.

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Undip merupakan salah satu departemen yang memiliki fokus pada bidang perencanaan kota dan wilayah yang secara tidak langsung bersinggungan dengan wilayah pesisir juga.. Selain itu, pihak Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota juga memiliki fungsi dalam proses perencanaan, monitoring, hingga evaluasi kawasan pesisir tersebut.

c) Privat dan LSM

PT Djarum yang berpusat di Kota Kudus merupakan pihak ketiga yang berperan sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang mana memiliki tanggung jawab dalam memberikan dampak pada lingkungan sekitarnya. Bantuan dana sangatlah diharapkan dalam menunjang keberhasilan implementasi program didalamnya.

Bintari merupakan salah satu organisasi masyarakat daerah yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir. Bintari memiliki fokus dalam proses memberdayakan masyarakat dan peninjauan aspek lingkungan terkait pembangunan yang dilakukan. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa Bintari membuka pintu seluas-luasnya untuk melakukan adanya kolaborasi dalam proses pengelolaan wilayah pesisir baik dengan pemerintah maupun swasta.

PENUTUP

Kota Semarang merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa yang dimana berarti Kota Semarang memiliki potensi wilayah pesisir yang perlu untuk dimaksimalkan. Pada kenyataannya banyak konflik yang terjadi di wilayah pesisir baik itu dari bencana berupa banjir rob hingga persoalan eksploitasi air tanah secara berlebihan. Maka dengan adanya hal tersebut perlu adanya pembenahan melalui implementasi *blue economy* yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di pesisir. *Blue economy* merupakan gagasan yang berorientasi pada pembangunan ekonomi melalui sektor kelautan yang memerlukan inovasi yang tinggi dalam menunjang pengembangannya. Adapun strategi dari penerapan *blue economy* di Kota Semarang yaitu dengan cara pemanfaatan teknologi dalam memaksimalkan akuakultur hingga perdagangan yang ada di wilayah pesisir Kota Semarang. Adapun penerapan *blue economy* di Kota Semarang dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir seperti nelayan, pengolah ikan, dan pembudidaya secara merata melalui teknologi yang diterapkan berupa digitalisasi akuakultur dan pembangunan UMKM melalui inovasi teknologi aplikasi.

Penerapan *blue economy* di Kota Semarang harus didukung oleh beberapa aktor dalam pengembangannya. Pertama, peran pemerintah sebagai pengendali keberjalanan program, pengelolaan sumberdaya, dan perizinan bisa melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kelautan, Perikanan Kota Semarang, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, Dinas Pariwisata Kota Semarang, dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang. Kedua, peran akademisi sebagai tinjauan berupa penelitian

yang teoritis bisa melalui Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro dan Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Undip. Ketiga, Privat dan LSM sebagai penunjang keberhasilan *blue economy* yang dapat melalui NGO seperti Bentari dan PT. Djarum.

Melihat dari kesimpulan yang ada maka penulis memberikan saran atau rekomendasi yaitu pemerintah Kota Semarang yang terkait dengan para kolaborator harus memaksimalkan adanya *blue economy* untuk wilayah pesisir di Kota Semarang. Pemanfaatan teknologi perlu dimasifkan lagi ke dalam sistem akuakultur serta perdagangan yang ada di wilayah pesisir agar membantu pendapatan ekonomi masyarakat wilayah pesisir. Adapun gagasan yang penulis rekomendasikan dengan rancang bangun aplikasi seperti model *fish market* berbasis *caused related marketing* yang mana sebagian keuntungan dari penjualan produk tersebut nantinya akan disalurkan kepada nelayan atau masyarakat pesisir secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Jusuf, Gellwynn (2012). *Ekonomi Biru Menjadi Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan* Siaran Pers Tanggal 6 Juni 2012.
- Miliasari, P. S., & Kartini, D. S. (2022). Hubungan Kemitraan antara Pemerintah dan Warga dalam Relokasi Tambak Rejo Kota Semarang Tahun 2019. *PERSPEKTIF*, 11(4), 1423-1431.
- Satria, Arif. (2015). *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Sunoto, 2013. *Menuju Perkembangan Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan dengan Konsep Blue Economy*. (Online). Diakses melalui:
<http://pasca.ugm.ac.id/download/BE-UGM.pdf>
- Tjandrawinata, R. R. (2016). Industri 4.0: Revolusi industri abad ini dan pengaruhnya pada bidang kesehatan dan bioteknologi. *Jurnal Medicinus*, 29(1).
- Triyanti, R., & Susilowati, I. (2019). Stakeholders Analysis of Sustainable Coastal Zone Management in the Gunungkidul Regency. *Jurnal Kebijakan Sosek KP*, 9(1), 23–35.
- Wahyuningsih, W., 2018, *Millenium Development Goals (Mdgs) Dan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Kesejahteraan Sosial*. Bisma, Vol. 11, No. 3, h. 390
- Yesiana, R., Zuliana, M. H., & Kirana, S. D. A. (2017). Pola Intervensi Stakeholder dalam Pengelolaan Pesisir Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, II(1), 25–40.
- Yonvitner, dkk. (2019). *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut* (edisi 2). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.